

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak keberhasilan reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping, China memasuki era-kebangkitan *Rising of China*, era ini juga disusul dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,8% per tahun (2017), pertumbuhan ini menandai kekuatan ekonomi China yang baru dan setara dengan negara-negara *superpower*. Sejak Presiden Xi Jinping menjabat, China terus berada dalam peningkatan dan kemajuan pesat yang mengakselerasi moneter dan ekonominya menjadi lebih dominan dan kuat, Oleh karena itu China dapat menginisiasi suatu program ekonomi, melakukan pembangunan besar-besaran dalam Infrastruktur, serta meningkatkan investasi mereka di luar negeri, hingga mampu membentuk “One Belt One Road” (OBOR) yang dipandang sebagai suatu rencana pengembangan paling besar dalam sejarah modern (Yayan Kurniawan, 2021). OBOR yang dibentuk tahun 2013 disempurnakan dengan kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) (Yudilla, 2019)

Xi Jinping mengeluarkan Belt and Road Initiative (BRI) di tahun 2016 sebagai bentuk upayanya untuk menghubungkan ekonomi Eurasia dengan perdagangan, infrastruktur, dan investasi. Kebijakan ini terdiri dari dua komponen, komponen pertama adalah Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (Silk Road Economic Belt) yang merupakan jalur darat penghubung bagian barat China dengan Eropa melalui Asia Tengah dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (The 21st Century Maritime Silk Road) yang merupakan jalur laut penghubung provinsi pesisir China dengan Asia Tenggara sampai Afrika melalui jalur kereta api dan pelabuhan (Syaiful Anam, 2018). Tujuan China membuat jalur-jalur ini adalah untuk menjadikan China sebagai pusat dari lalu lintas aktivitas perdagangan dan ekonomi dunia (Nafisah Rizqillah Maharani, 2022).

Tidak hanya sebagai proyek pendorong interkoneksi dan keterbukaan antar wilayah yang memberikan kesempatan bagi negara-negara terlintas untuk memaksimalkan potensi dari keuntungan mereka, proyek ini juga memberikan investasi yang dapat memberikan pihak-pihak terlibat keuntungan. Salah satu bentuk keuntungan yang didapatkan seperti, dalam merealisasikan proyek ini China memberikan investasi sebanyak 300 miliar dolar, yang mana dana ini diprioritaskan pemerintah China untuk memberikan bantuan pada negara-negara yang dianggap memiliki nilai strategis (Ramadhan, 2018). Meskipun proyek ini memiliki banyak keuntungan bagi China, namun proyek ini dapat menjadi ancaman bagi negara-negara yang terlibat untuk mengalami kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri dan ancaman ketergantungan, khususnya negara-negara penerima pinjaman luar negeri China (Ramadhan, 2018).

Vietnam adalah salah satu negara yang sempat berada dalam masa krisis ekonomi hingga mengalami stagnasi ekonomi sampai digolongkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1980-an setelah perang saudara pada tahun 1955 (Nafisah Rizqillah Maharani, 2022). Pembangunan ekonomi Vietnam dibagi menjadi dua periode, periode pertama ditandai dengan 10 tahun rencana ekonomi tahun 1975-1985 dan periode kedua terlihat pada saat tahun-tahun pasca reformasi Vietnam menjadi lebih ke arah ekonomi yang diserahkan ke pasar hingga saat ini. Vietnam membuat rencana nasional dengan tujuan menjaga peningkatan pertumbuhan dan demi menjaga terjadinya penurunan di beberapa tahun terakhir, Vietnam menggunakan investasi asing, perbaikan infrastruktur, dan iklim bisnis sebagai sumber daya domestik demi memperbaiki perekonomian masyarakatnya. Bersama negara-negara lain, Vietnam juga menjaga hubungan kerjasama ekonomi dan integrasi ekonomi regionalnya, khususnya dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Beberapa bentuk kerjasamanya diantaranya seperti pada program pembangunan, kerjasama ekonomi, perdagangan, dll. Contohnya seperti keputusan, Vietnam untuk menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) di tahun 2006, disamping itu, Vietnam juga merencanakan pembangunan untuk menjadi negara industri dan melakukan kerjasama program pembangunan dalam negeri dengan negara lain. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah kerjasama yang dilakukan Vietnam dengan China. Kerjasama kedua negara ini sebenarnya telah terjalin sebelum reformasi ekonomi Vietnam, dimana China telah menjadi sumber

donor utama Vietnam sejak 1955 hingga 1975 (Nafisah Rizqillah Maharani, 2022). Vietnam dan China juga banyak melakukan kerjasama ekonomi, bahkan dalam 11 tahun terakhir ini, China merupakan mitra dagang terbesar bagi Vietnam (Castillo, 2008). Secara geografis, Vietnam terletak dekat dengan China. Oleh karena itu, kedua negara ini beberapa kali terlibat perselisihan dan kerjasama. Seperti perselisihan wilayah klaim Laut China Selatan dan peristiwa masa lampau, dimana terjadi perang Vietnam dengan China yang membuat adanya pasang surut dari kedua negara tersebut (Ramadhan, 2018).

Dalam beberapa tahun ke depan, Vietnam memprediksi adanya peningkatan pembangunan infrastruktur. Menurut data dari *Global Infrastructure Outlook*, di tahun 2016 hingga 2040, jumlah pendanaan pembangunan infrastruktur Vietnam mencapai kisaran USD 605 miliar. Kebutuhan ini dibagi menjadi beberapa sektor, seperti sektor kelistrikan dan jalan raya yang memerlukan dana sekitar 43.8 persen serta 22,1 persen dari dana total keseluruhan yang dibutuhkan. Current Investment Vietnam menunjukkan angka USD 503 Miliar, sehingga terdapat 102 Miliar yang Vietnam butuhkan untuk pendanaan kebutuhan pembangunan infrastrukturnya (Yayan Kurniawan, 2021). Namun, kebutuhan Vietnam akan dana pembangunan yang besar tersebut, ternyata juga disertai dengan kendala pemerintah Vietnam dalam pendanaan yang dilatarbelakangi dengan status Vietnam sebagai negara *middle income* pada tahun 2009 yang membuat Vietnam sulit untuk mempromosikan *Public Private Partnership* yang disebabkan ketatnya regulasi hukum dan keuangan. Sehingga dana yang dialirkan untuk Vietnam oleh *Official Development Assistance* (ODA) mengalami penurunan signifikan.

Adanya Proyek Belt and Road Initiative (BRI) China menjadi jawaban atas kendala kebutuhan pendanaan pengembangan infrastruktur Vietnam. Besarnya pengeluaran China untuk proyek BRI, yang berada pada kisaran USD 100 M per tahun, membuat China mendirikan beberapa bank yang mendukung proyek BRI, salah satunya adalah Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang didirikan pada tahun 2015 untuk membantu pendanaan infrastruktur ke sejumlah negara, khususnya negara pada wilayah strategis jalur sutra (Syarif Anam, 2018). Namun, Vietnam sempat memiliki kecurigaan dan keraguan pada China mengenai proyek pembangunan BRI di Vietnam. Meskipun terdapat kecurigaan di awal, pada tahun 2017, kedatangan Xi Jinping ke Vietnam menandai diratifikasinya nota kesepahaman kerangka kerjasama antara China dengan Vietnam mengenai komitmen mempromosikan kerjasama “Two Corridors, One Belt” dalam proyek pembangunan BRI, 2 koridor ini diciptakan dengan tujuan menghubungkan Yunan serta Guangxi bersama dengan 12 kota dan provinsi Vietnam. Koridor ini terdiri dari *koridor Kuming-Lao Cai-Ha Noi-Hai Phong-Quang Ninh* dan *koridor Nanning-Lang Son-Ha Noi-Hai Phong Quang Ninh*. Berbeda dengan *Tonkin Gulf Economic Belt* yang memiliki tujuan memastikan peningkatan kerjasama ekonomi antara kedua belah pihak yang terlibat. Serta masih terdapat 18 proyek BRI yang tersebar di 7 wilayah (Nafisah Rizqillah Maharani, 2022). Selain terlibat dalam proyek kerjasama, Vietnam juga mendapatkan dampak dari pembangunan BRI, dari bidang sektor modal yang mencakup *Foreign Direct Investment* (FDI), *portfolio investment*, serta *official investment*. Dimana Vietnam menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang mendapatkan investasi dari China sebesar USD 152 miliar (Cox, 2018). Namun, adanya peningkatan pada penerapan pinjaman China telah menjadi kekhawatiran Vietnam Ministry of Planning and Investment, hal ini dikarenakan peningkatan pinjaman China ini menimbulkan resiko perangkap utang bagi Vietnam (bin Abdullah, 2020)

B. Rumusan Masalah

Mengapa Implementasi Belt and Road Initiative (BRI) China Berpotensi Mengancam Kedaulatan Vietnam?

C. Kerangka Berfikir

I. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Awal perkembangan Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) dimulai oleh Raul Presbich (Direktur Economic Commission for Latin America, ECLA) di akhir tahun 1950-an. Raul Presbich beserta dengan rekannya bimbang akan perkembangan berbagai negara miskin pada pertumbuhan

ekonomi tidak memiliki perkembangan yang sama dengan negara-negara maju yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Justru, pada kajiannya, ditemukan bahwa aktivitas ekonomi berbagai negara yang lebih kaya sering memberikan masalah-masalah ekonomi pada berbagai negara miskin (Dr. Ridwan, 2023).

Dalam Teori Ketergantungan terdapat dua bentuk tradisi, tradisi pertama adalah tradisi yang dikembangkan Baran, Gunder Frank, dan Swezzy yakni adalah tradisi American Marxist yang merupakan percabangan dalam tulisan Dos Santos, Bamberger, Oujano, dan Marini, Kedua, tradisi Latin American-Structuralist yang berbasis tulisan-tulisan Anibal Pinto, Prebisch, dan Furtado yang bergabung pada ECLAC. Dalam kedua tradisi ini meskipun ditemukan banyak perbedaan, khususnya pada kepercayaan keberadaan kebebasan dalam sistem perekonomian internasional, kedua tradisi ini mempunyai argument yang sama dalam anggapan bahwa yang dapat menyukseskan pembangunan negara melalui proses industrialisasi suatu negara adalah inovasi teknologi dan bukanlah modal asing (Utama, 2021).

Menurut Theotonio Dos Santos (1970), ketergantungan diartikan sebagai kondisi dimana perluasan dan perkembangan kehidupan ekonomi di negara lain dapat mempengaruhi keadaan kehidupan ekonomi di suatu negara. Disamping itu, negara-negara lain hanya bertindak sebagai penanggung akibat dari kondisi tersebut. Hubungan ketergantungan pada antara dua system ekonomi maupun lebih, serta antara berbagai sistem ekonomi ini dengan perdagangan dunia dapat terjadi jika ekonomi negara-negara dominan dan maju dapat melakukan ekspansi serta dapat berdiri sendiri, namun ekonomi beberapa negara yang tergantung berubah hanya sebagai dampak dari ekspansi yang terjadi, bisa dalam bentuk positif maupun negatif (Santos T. D., 1970). Sedangkan menurut Mohtar Mas'ood Teori Ketergantungan (Dependencia) didefinisikan sebagai teori yang menjelaskan bahwa penetrasi asing dan ketergantungan eksternal dapat berakibat munculnya distorsi besar-besaran pada suatu struktur ekonomi *periphery* (pinggiran), yang dalam gilirannya membuat terjadinya konflik sosial yang genting hingga akhirnya mendorong terjadinya penindasan negara kepada rakyat disuatu masyarakat yang bergantung tersebut. Saat ini, hampir seluruh negara dunia ketiga menghadapi penetrasi mendalam dan sangat bergantung dengan negara-negara industri maju dan juga ekonomi dunia. Berbagai cara dapat dilakukan untuk melakukan penetrasi, baik dalam politik, kultural, dan ekonomi, serta dalam banyak periode perkembangan suatu negara (Mas'ood, 1994).

Berdasarkan pandangan Santos, negara *periphery* juga dapat berkembang, meskipun perkembangannya bergantung. Implus serta dinamika perkembangan itu berasal dari negara pusat dan bukan datang dari negara pinggiran. Ketidakmampuan negara-negara pinggiran dalam menyeimbangkan perekonomiannya dengan ekonomi negara pusat atau negara maju dapat menjadi penyebab terjadinya ketergantungan dan ketertinggalan bagi negara-negara pinggiran tersebut. Sehingga, jika kondisi ekonomi negara pusat mengalami kemajuan dan perkembangan, maka ekonomi dari negara pinggiran dapat mengikuti kemajuan serta perkembangan negara pusat. Berbeda dengan jika negara pusat yang berada dalam kondisi sulit pada perekonomiannya, maka negara-negara pinggiran tersebut juga akan berada dalam kondisi kesulitan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kebergantungan ekonomi negara pinggiran dengan negara pusat. Meskipun demikian, negara pusat tidak bergantung dengan kondisi ekonomi negara-negara pinggiran (Santos T. D., 1970)

Dos Santos membagi bentuk-bentuk dari ketergantungan kedalam tiga bentuk yang terdiri dari

1. Ketergantungan kolonial, dimana kehadiran dominasi politik dalam bentuk penjajahan yang dilakukan negara pusat pada negara pinggiran. Ekspor produk pertanian yang di butuhkan negara kolonial dan perdagangan dalam bentuk ketergantungan ini merupakan kegiatan ekonomi yang utama. Hubungan diantara penduduk lokal dan penjajah bersifat eksploitatif, dimana koloni melakukan monopoli dalam tenaga kerja, tanah, dan tambang.
2. Ketergantungan finansial-Industrial, ketergantungan ini terjadi saat negara *periphery* yang belum mapan secara finansial, perlu bergantung dengan negara *core* secara finansial untuk dapat membuat roda perekonomian negerinya berjalan. Ketergantungan sumber daya finansial dapat menyebabkan negara *core* mengambil kendali atas kekuatan industri dan keuangan negara-negara *periphery*. Negara *core* melakukan investasi secara kemitraan bersama pengusaha lokal maupun secara langsung untuk menghasilkan bahan baku ini. Sehingga kendali dilakukan dengan kekuatan ekonomi dalam bentuk kekuatan finansial industri.
3. Ketergantungan Teknologi-Industrial, ketergantungan teknologi industrial diawali pada anggapan bahwa negara *periphery* belum mampu dan cakap dalam hal Teknologi Industrial,

oleh karena itu negara *periphery* perlu menerima bantuan negara *core* atau perusahaan multinasional dalam pengembangan serta pembangunan teknologi industrial dalam negerinya. Dengan bentuk yang lebih modern, ketergantungan terjadi dimana negara *core* atau negara pusat memiliki peran untuk mengurus perizinan dari perusahaan multinasional negara *core* dan melakukan penanaman modal sebagai bentuk dalih investasi pada negara *periphery* melalui perusahaan tersebut. Negara-negara *core* dengan perusahaan multinasionalnya akan mulai melakukan investasi pada kegiatan industri, nantinya produk yang dihasilkan akan ditargetkan kepada pasar domestik negara-negara pinggiran. Teknologi dalam industri tersebut berada dalam kendali perusahaan multinasional negara pusat meskipun industri ini berada di negara pinggiran dan seringkali dimiliki pengusaha lokal. Mesin industri tersebut biasanya disewakan melalui perjanjian paten, bukan dijual sebagai komoditas (Santos T. D., 1970). Dalam ketergantungan teknologi, Dos Santos menguraikan bahwa siklus akumulasi modal di negara-negara bergantung tidak bisa diselesaikan dengan cara internal karena mereka hanya mempunyai sektor barang modal yang sederhana dan masih muda. Sebagian besar mesin, peralatan, dan alat untuk mengekstraksi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah *periphery* merupakan hasil impor dari negara-negara *core* (Kay, 2019).

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan padangan Dos Santos, tidak terintegrasinya ekonomi negara-negara pinggiran dengan kapitalisme merupakan penyebab terjadinya keterbelakangan. Disamping itu, kepatuhan dalam hukum pembangunan dan integrasi negara-negara pinggiran pada sistem internasional adalah hambatan terbesar untuk pembangunan di negara-negara pinggiran. Dos Santos percaya bahwa kapitalisme adalah penyebab dari masalah dan bukanlah jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketergantungan dianggap sebagai kondisi historis yang membuat struktur tertentu pada ekonomi dunia yang merugikan suatu negara dan menguntungkan negara lain serta dapat membuat kemungkinan pengembangan bawahan ekonomi menjadi terbatas (Santos T. D., 1970).

Sedangkan sebagaimana yang tertera dalam gambar dibawah, Gunder Frank berpendapat bahwa keterbelakangan yang terjadi di berbagai negara dunia ketiga bukanlah fenomena yang terjadi secara alami atau natural. Frank mengatakan jika butuh proses bertahun-tahun lamanya untuk membentuk keterbelakangan. Hal ini dijelaskan Frank dengan konsep kapitalisme yang menjelaskan bahwa keberadaan negara *core* (maju) berpotensi merugikan negara *periphery*, hal ini dilatarbelakangi oleh upaya negara *core* untuk terus mendapatkan sumber daya negara *periphery*, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam (Frank, 1967). Dalam Teori Ketergantungan, terdapat hipotesis utama yang sering kali diangkat. Pertama adalah hipotesis yang menyatakan bahwa dalam membangun negara *periphery* dibutuhkan hubungan subordinasi diawal dengan negara inti. Kedua, perkembangan ekonomi paling besar negara *periphery* akan terjadi saat lemahnya ikatan negara *periphery* dengan negara inti. Ketiga, ketika negara inti telah pulih dari krisis serta membentuk kembali ikatan investasi dan perdagangan. Secara langsung negara inti membuat negara pinggiran berada pada sistem ketergantungan yang membuat pertumbuhan industrialisasi wilayah.

Dalam kasus yang terjadi di Vietnam, penulis berusaha menggambarkan ketergantungan Vietnam dengan China sebagai berikut:

1. Vietnam sebagai negara peminjam dikategorikan sebagai negara *periphery*
2. China sebagai negara pemberi utang berada dalam kategori sebagai negara *core*

Vietnam sebagai negara *periphery* yang kesulitan dalam membangun infrastrukturnya dikarenakan menghadapi kesulitan pendanaan, harus menerima pinjaman utang luar negeri kepada pemerintah China. Terlebih lagi, Vietnam bukanlah negara yang kekurangan sumber daya, tetapi, Vietnam merupakan negara yang kekurangan pendanaan dalam pembangunan nasionalnya. Salah satu contoh kasus dalam sistem infrastrukturnya adalah usulan di tahun 2001 mengenai konstruksi jalur kereta enam jalur yang tertunda dikarenakan ketidak cukupan dana dari Vietnam. Disamping itu, dalam bidang perdagangan lintas batas, Jika dibandingkan dengan China, Impor Vietnam terhitung lebih banyak dan terus mengalami peningkatan secara terus menerus pada defisit perdagangan Vietnam dengan China yang membentuk adanya suatu ketidakseimbangan perdagangan yang besar diantara kedua negara tersebut, hal ini dapat memberikan dampak negatif alam neraca pembayaran serta nantinya dapat mengancam perekonomian suatu negara. dan hal inilah yang menyebabkan Vietnam bergantung kepada China secara finansial (Toai, 2018).

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di Vietnam, dimana negara-negara berkembang, termasuk Vietnam, perlu untuk bergantung pada negara *core* dengan tujuan mendukung pembangunan di negaranya, penulis menganggap bahwa teori ini cocok dengan kondisi tersebut, Dalam pembahasan ini, ketergantungan pinjaman luar negeri dari suatu negara adalah ketergantungan yang terjadi.

II. Konsep Diplomasi Jebakan Hutang (*Debt-trap Diplomacy Concept*)

Pada literatur kerjasama ekonomi, ada yang dinamakan bantuan pinjaman modal dan juga investasi. Salah satu contoh implementasinya dapat kita lihat dalam sejarah global. Sejak perang di Eropa berakhir, hal ini seringkali terjadi, dimana banyak negara kawasan yang mengalami kesulitan untuk mengakselerasi ekonominya setelah biaya perang yang telah menguras perekonomian negara-negara tersebut, pada situasi ini AS sebagai negara sekutu memberikan bantuan dana dengan skema bantuan yang dinamakan Marshall Plan. Disamping itu, konsep pinjaman dana dan investasi dalam implementasinya tidak selalu untuk mendorong pembangunan dan akselerasi ekonomi, baik dari infrastruktur, produksi dan perdagangan suatu negara, negara *borrower* tetap dapat memiliki peluang mengalami kondisi yang disebut dengan *debt-trap* (perangkap hutang), suatu kondisi kesulitan mengembalikan jumlah utang yang besar (Steil, 2018). Penerimaan suntikan dana ini, juga banyak terjadi di negara-negara berkembang (Lancaster, 2007).

Debt (Hutang) merupakan sesuatu yang dipinjam, dapat berbentuk benda dan juga uang. Badan usaha dan seseorang yang menerima pinjaman tersebut dinamakan debitur. Sedangkan yang memberikan pinjaman tersebut disebut dengan kreditur. Menurut Didik Rachbini, hutang negara didefinisikan sebagai hutang yang dipinjam oleh pemerintah dalam bentuk benda maupun uang. (Rachbini, 2001, p. 27). Berbeda dengan *Trap* (Jebakan/ Perangkap) merupakan situasi tidak memahami apa yang diperbuat diawal, namun mendapatkan hal yang tidak terduga diakhir. kejutan yang dimaksud tersebut merupakan jebakan atau perangkan yang dibuat dengan memanipulasi dan berbagai macam trik. (Oxford, 2018).

Definisi dari *Debt-Trap*/Jebakan Hutang sendiri adalah suatu situasi dimana peminjam tidak mampu mengembalikan atau membayar kembali uang yang sudah mereka pinjam dan peminjam terjebak dalam siklus peminjaman akibat dari pembayaran pinjaman mereka secara terus menerus. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayar pinjaman yang telah disepakati atas pokok pinjaman sesuai dengan yang dijanjikan. Untuk mendapatkan keuntungan dari peminjam yang sangat memerlukan dana, 'predatory lender' atau lembaga keuangan dengan praktik penipuan serta ketentuan yang tidak masuk akal akan membuat suku bunga yang tinggi dan jangka pendek. Terdapat dua hal yang menjadi variabel dasar dalam perjanjian peminjaman. Pertama, pokok pinjaman, yakni adalah jumlah uang yang dipinjamkan. Kedua, bunganya, yakni jumlah uang yang ditentukan oleh pemberi pinjaman pada pokok uang yang dipinjam. Dalam hal ini, dalam membayar uang pinjaman diartikan membayar kembali pokok dan bunganya.

Perangkap hutang dapat terjadi saat peminjam tidak memiliki kemampuan untuk membayar atas pokok pinjaman. Dalam konteks aktor/negara sendiri, konsep *Debt-Trap* diartikan sebagai suatu situasi saat aktor/negara yang memiliki hutang dengan negara/aktor lain tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Sehingga, aktor/negara peminjam akan dikejutkan dengan yang disebut jebakan/perangkap dari aktor/negara yang memberi pinjaman. situasi ini dapat membuat aktor/negara pemberi pinjaman memiliki aturan atau kebijakan yang dapat mengontrol aktor/negara peminjam.

Bajo dan Roelants mendefinisikan *debt-trap* (perangkap utang) sebagai konsekuensi dari jalan yang bersifat sistematis untuk utang yang berkembang dalam arti peningkatan ketidaksetaraan antara negara yang memberi pinjaman dengan negara yang mendapat pinjaman, dan mengurangi campur tangan dari pemerintah yang meminjam utang. sehingga dapat dimengerti jika negara yang memiliki masalah dengan utang yang besar dari negara lain berpeluang menjadi korban jebakan dari negara yang memberikan pinjaman. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi; pertama, situasi dari negara *borrower*, terutama jika kondisi ekonomi negara tersebut lebih lemah saat dibandingkan dengan negara *lender*. Kedua, dapat dinilai dari kondisi kredit pinjaman yang bisa dimodifikasi dengan bunga oleh negara *lender* [Faris Al-Fadhat, 2022].

Istilah Debt-trap, juga dikenal sebagai salah satu bentuk diplomasi, dimana menurut Wening Setyanti & Nanang Pamuji Mugasejati (2018), istilah Debt-Trap Diplomacy merupakan kosa kata baru di dunia hubungan internasional yang dipopulerkan pada saat China sedang menjadi pusat perhatian dunia oleh seorang akademisi dari India diawal tahun 2017 (Haderiansyah, 2020). Akademisi tersebut bernama Brahma Chelanne, dimana ia merujuk debt-trap diplomacy sebagai suatu strategi yang memosisikan suatu negara dalam situasi yang cukup rumit, dengan tujuan untuk mendapatkan konsesi politik maupun ekonomi, pinjaman secara berlebih diberikan pada negara lain disaat negara tersebut gagal dalam proses pengembalian hutang (Nurjayanti, 2020). Istilah ini dikembangkan kembali melalui makalah oleh kedua mahasiswa pascasarjana dari Harvard University dengan sebutan “Chinese debt book diplomacy” (Brautigam, 2020). Diplomasi perangkap hutang dianggap sebagai salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri melalui pemberian insentif negatif dan positif (Alden, 2020). Penelitian mengenai diplomasi bantuan China selama beberapa tahun terakhir menemukan, batuan miliaran dolar dikeluarkan China sebagai pinjaman untuk negara-negara miskin di dunia demi memberikan bantuan dana pada proyek infrastruktur mereka secara terang-terangan. Meskipun demikian, banyak negara tersebut yang awalnya tidak mampu membayar, menjadi harus memberikan asset strategis dan sumber daya alam mereka sebagai jaminan. Upaya ini sangat menguntungkan China dalam mempromosikan kepentingan politik dan ekonominya secara global. Kejadian ini banyak disebut sebagai “diplomasi perangkap hutang”. Dalam beberapa studi kasus, seperti Srilanka, Pakistan, Filipina, dan Afrika kasus ini terjadi. Parker dan Chefitz (2018) mengatakan bahwa BRI bukanlah Marshall Plan: dimana dalam pinjaman ini merupakan pinjaman yang mengharap pengembalian. Dalam berbagai studi kasus tersebut menunjukkan pinjaman China yang rentan korupsi, mahal, dan tidak kompetitif. Dimana suku bunga pinjaman ini dapat dikatakan mahal jika dibandingkan dengan suku bunga Jepang, yang mana mencapai 2-3%, berbeda dengan Jepang yang hanya sebesar 0,25-0,75% (Nguyen Van Chinh, 2020).

Debt-trap diplomacy berkaitan erat dengan salah satu kebijakan China yaitu Belt and Road Initiative, dimana kebijakan ini terfokus dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jaringan rel kereta api, hingga pelabuhan yang dibangun di teritorial negara lain dan mempunyai posisi strategis serta akan berdampak baik untuk pencapaian kepentingan China dalam mencapai “Jalur Sutra baru”. Faktor kebutuhan dan ketidaksetaraan adalah salah satu hal yang sering kali melatarbelakangi suatu negara menerima pinjaman atau berhutang. Ketidaksetaraan ini dapat berasal dari kurang meratanya kesejahteraan masyarakat di negara tersebut sehingga hutang dijadikan negara sebagai pendukung yang dilakukan sebab negara perlu melakukan pembelanjaan demi pembangunan dan pengembangan yang dapat berdampak secara komprehensif pada kesejahteraan masyarakat, adanya faktor kebutuhan lain serta nilai konsumtif suatu entitas yang tinggi juga berpengaruh pada adanya ketidaksetaraan (Bajo, 2011).

III. Konsep Kedaulatan

Suatu negara perlu untuk menjaga kedaulatannya dikarenakan kedaulatan merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang tertera dalam literatur kenegaraan, dimana adanya pemerintahan, wilayah, dan rakyat yang berdaulat merupakan syarat dari berdirinya suatu negara. Negara yang berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi (supreme authority) dengan arti bebas dalam arti yang komprehensif baik ke dalam dan keluar, seperti bebas dari kekuasaan negara lain. Pada tulisan Jean Bodin yang memaparkan pentingnya kedaulatan untuk pelaksanaan pemerintahan serta sejak itu kedaulatan adalah masalah sentral pada penjelasan perangkat negara modern dari hukum internasional. Disamping itu, dalam pemikiran Hans Kelsen, kedaulatan merupakan suatu kualitas penting dari negara yang memiliki arti negara tersebut adalah satu kekuasaan yang paling tinggi serta kekuasaan yang diartikan kekuatan atau hak untuk memaksa. Hukum internasional hanya berlaku jika diakui oleh negara berdaulat (Setiani, 2017).

Terdapat bermacam variasi mengenai penggunaan dan makna konsep dari kedaulatan tidak mengurangi definisi penting konsep kedaulatan negara dalam sistem hukum internasional dan pada teori hubungan internasional. Kerangka hubungan antarnegara juga mengartikan kedaulatan dalam kemerdekaan (independence) serta vice versa. negara yang merdeka diartikan sebagai negara yang berdaulat, negara berdaulat merupakan negara yang tidak dalam kekuasaan negara lain dan merdeka. Kedaulatan serta kesederajatan negara merupakan atribut yang terikat pada negara merdeka sebagai

subyek dari hukum internasional, hal ini adalah dasar untuk personalitas negara pada sistem hukum internasional (Riyanto, 2012)

D. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Metode kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan interpretatif yang berupaya dalam mendapatkan data dengan pengalaman subjektif dalam membangun struktur penelitian mencakup konsep, abstrak, teori, dan hipotesis (Palmer, 2006). Tujuan dari penelitian dengan metode kualitatif adalah untuk menghasilkan data analisis dalam bentuk gambar, table, teks dan laporan (Cresswell, 2009).

Pengamatan dengan metode kualitatif dilakukan pada kejadian, keaslian, dan prosedur. Melalui observasi terlibat, wacana, analisis percakapan, serta isi, dan pengambilan data ethnografis, penelitian metode kualitatif dilakukan (Cresswell, 2009). Disamping itu, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif bersifat deskriptif. Metode Deskriptif ini diusahakan untuk memberikan gambaran kondisi atau kenyataan yang ada melalui dukungan konsep dan juga teori yang telah dijelaskan melalui kerangka berfikir. Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan melalui metode *library research* atau kepustakaan. Dimana data yang telah terkumpul dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan melalui berita, jurnal, buku, maupun sumber-sumber internet yang lainnya yang dianggap memiliki sumber yang jelas dan terpercaya serta memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

E. Hipotesis

China sebagai negara *core* dalam proyek pembangunan BRI akan menentukan dan mengatur *bargaining position*-Nya dengan pihak Vietnam sebagai negara *periphery*. Pada tahap *debt-trap* ini, sehingga China mampu membentuk suatu ketergantungan atau yang disebut dengan *dependence*, pengaruh, dan *leverage* dalam ketergantungan finansial industrial dan ketergantungan teknologi-industrial yang akan membuat China memiliki power untuk mentransformasikan jalannya pinjaman (utang) menjadi *debt-trap* yang dapat mengancam kedaulatan Vietnam.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian terhadap topik permasalahan ini menggunakan jangkauan atau batasan penelitian serta studi kasus dengan tujuan agar lebih spesifik dan jelas. Dimana dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan mengenai persoalan mengapa kerjasama proyek pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) China dapat berpotensi mengancam kedaulatan Vietnam. Permasalahan ini diawali melalui perkembangan perekonomian China hingga dapat mulai melakukan ekspansi ekonomi melalui proyek pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) dengan beberapa negara, salah satunya Vietnam. Adanya potensi ancaman *Debt-Trap* ‘jebakan atau perangkap hutang’ bagi kedaulatan Vietnam dengan jangkauan penelitian dari tahun 2017 saat proyek BRI diratifikasi pertama kali di Vietnam hingga tahun 2021.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini supaya pembaca dapat memahami dengan jelas dan teratur maka penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I : Meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Meliputi Kebangkitan Perekonomian China Setelah dan Sebelum Reformasi Ekonomi serta Kondisi Perekonomian Vietnam Setelah Reformasi Ekonomi.

- Bab III** : Meliputi Dinamika Kerjasama Ekonomi China dengan Vietnam serta Implementasi Belt and Road Initiative (BRI) China di Vietnam.
- BAB IV** : Meliputi ketergantungan finansial Vietnam dengan ekonomi China, ketergantungan teknologi-industri Vietnam dengan China untuk mendukung kesuksesan serta analisis potensi ancaman Debt-Trap Diplomacy China melalui Belt and Road Initiative (BRI) di Vietnam.
- BAB V** : Kesimpulan dari keseluruhan bab.

